



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA, PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu memberikan Penghasilan tetap, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2052);
 7. Peraturan Pemerintah Rerpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Minahasa Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
21. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melaluirekening kas desa.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa denganbelanja desa.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalahselisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :
 - a. Penghasilan tetap Hukum Tua sebesar Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Penghasilan tetap Kepala Urusan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- c. Penghasilan tetap Kepala Seksi sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Penghasilan tetap Kepala Jaga sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - e. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Penghasilan tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan.
- (4) Penghasilan tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persyaratan berupa:
- a. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Penghasilan tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Hukum Tua mengetahui Camat;
 - c. Daftar Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Daftar Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Pasal 3

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dibahas disepakati Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diserahkan oleh Bupati paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.

- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi Hukum Tua wajib memperbaikinya.
- (5) Hukum Tua memperbaikinya rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Hukum Tua dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Hukum Tua kepada Bupati melalui camat.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan Sekretaris Desa disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati

Pasal 6.

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hukum Tua dalam jangka 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB IV

SASARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Sasaran Alokasi Dana Desa adalah wilayah administrasi Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) Desa dan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan Desa sebelumnya harus di laksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diketahui oleh Hukum Tua.
- (3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
- (4) Bagian dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) setiap desa sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pencairan dana dalam rekening Desa ditandatangani oleh Hukum Tua dan Bendahara Desa.

BAB VI
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

BAB V
KEBENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN MEKANIISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud di laksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang selanjutnya dirumuskan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
- (4) Bagian dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa digunakan untuk:
 - Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) setiap desa sebagaimana beda lain yang ditetapkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan...

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Penyerahan dan dalam rekening Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BAB VI
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Hemat, Terarah dan Terkendali.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh A/D dilaksanakan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) A/D dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Hemat, Terarah dan Efektif.

**BAB VII
KETERANGAN PERALIHAN**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

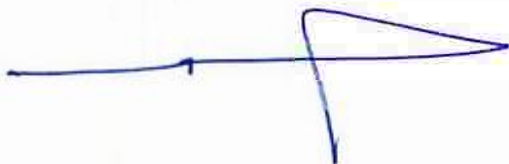
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Di tetapkan di Ratahan

Pada Tanggal 9 Januari 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMPENDAP

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASUBID		
2	KABID PEMDES		
3	SEKRETARIS BPP-PD		
4	KABAG KUKUM		
5	KEPALA BADAN PM-PD		
6	KEPALA BPK-BMD		
7	INSPEKTOR		
8	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMRA		
9	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
10	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
11	BUPATI MINAHASA TENGGARA		

Dr. Mohon Untuk Diundangkan!

Diuundangkan di Ratahan

Pada Tanggal 9 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

BACH ADRIANUS TINUNGKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016

NOMOR 281

BAB VIII
KENTRAN FINITUP

Pasal 13

1. Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 2. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nama dalam Berita Daerah.

Di Kabupaten Tanah
 Pada Tanggal 20 Desember 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

NO	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
1	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
2	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
3	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
4	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
5	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
6	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
7	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
8	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
9	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
10	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN
11	REKAMEN	REKAMEN	REKAMEN

Diundangkan di Kabupaten

Pada Tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

BACH ADRIANUS TIMUNGKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016

NO. 01

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 5 Januari 2016
 Tanggal : 24 Januari 2016
 Tentang : Pemberian Penghasilan Tetap Hukum, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016.

DAFTAR PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Sekel	Kepala Jaga	BPD	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Sekel	Kepala Jaga	TUNJANGAN BPD	ALOKSI DANA DESA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Toulunan													
	1 Toundanouw	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	2 Ranoketang Atas	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	3 Lohu Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	4 Lohu Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	5 Lohu Kota	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	6 Lohu Atas	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Lohu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	8 Toundanouw Atas	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	9 Toundanouw Satu	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	10 Ranoketang Atas Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
Jumlah		109	10	30	30	39	50	300,000,000	216,000,000	216,000,000	280,800,000	270,000,000	140,000,000	1,422,800,000

2	Toulunan Selatan													
	1 Kalait Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	2 Kalait Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	3 Kalait Tiga	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	4 Kalait	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	5 Ranoako	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	6 Tambelang	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Suhuyon	9	1	3	3	2	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	14,400,000	27,000,000	14,000,000	128,600,000
	8 Lowatag	9	1	3	3	2	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	14,400,000	27,000,000	14,000,000	128,600,000
	9 Bunag	9	1	3	3	2	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	14,400,000	27,000,000	14,000,000	128,600,000
	10 Banga	9	1	3	3	2	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	14,400,000	27,000,000	14,000,000	128,600,000
Jumlah		101	10	30	30	31	50	300,000,000	216,000,000	216,000,000	223,200,000	270,000,000	140,000,000	1,365,200,000

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Seksi	Kepala Jaga	BPD	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Seksi	Kepala Jaga	TUNJANGAN BPD	ALOKSI DANA DESA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Silian Raya													
1	Silian Barat	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
2	Silian Utara	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
3	Silian Tengah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
4	Silian Tiga	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
5	Silian	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
6	Silian Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
7	Silian Timur	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
8	Silian Selatan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
9	Silian Kota	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
10	Silian Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	Jumlah	110	10	30	30	40	50	300,000,000	216,000,000	216,000,000	288,000,000	270,000,000	140,000,000	1,430,000,000

4	Tombatu													
1	Tombatu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
2	Tombatu Satu	14	1	3	3	7	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	50,400,000	27,000,000	14,000,000	164,600,000
3	Betelen	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
4	Betelen Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
5	Kali	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
6	Kali Oki	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
7	Tombatu Tiga Timur	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
8	Tombatu Tiga Selatan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
9	Tonsawang Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
10	Tonsawang	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
11	Pisa	9	1	3	3	2	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	14,400,000	27,000,000	14,000,000	128,600,000
	Jumlah	124	11	33	33	47	55	330,000,000	237,600,000	237,600,000	338,400,000	297,000,000	154,000,000	1,594,600,000

5	Tombatu Timur													
1	Molompar	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
2	Molompar Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
3	Molompar Atas	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
4	Molompar Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
5	Molompar Dua Utara	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
6	Molompar Dua Selatan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
7	Mundung	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Seksi	Kepala Jaga	BPD	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Seksi	Kepala Jaga	TURJANGAN BPD	ALOKSI DANA DESA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8 Mundung Satu	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	9 Esabdom	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	10 Esandom Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	11 Esandom Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	Jumlah	124	11	33	33	47	55	330,000,000	237,600,000	237,600,000	338,400,000	297,000,000	184,000,000	1,594,600,000

6 Tombatu Utara														
	1 Tombatu Dua Utara	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	2 Tombatu Dua Tengah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	3 Tombatu Dua Barat	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	4 Tombatu Dua	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	5 Tombatu Tiga	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	6 Tombatu Tiga Tengah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Kuyangan Satu	13	1	3	3	6	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	43,200,000	27,000,000	14,000,000	157,400,000
	8 Winorangan	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	9 Kuyangan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	10 Winorangan Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	Jumlah	114	10	30	30	44	50	300,000,000	216,000,000	216,000,000	316,800,000	270,000,000	140,000,000	1,488,800,000

7 Pasan														
	1 Tolombukan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	2 Tolombukan Satu	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	3 Tolombukan Barat	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	4 Liwutung	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	5 Liwutung Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	6 Liwutung Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Maulit	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	8 Towuntu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	9 Towuntu Barat	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	10 Paniki	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	11 Towuntu Timur	13	1	3	3	6	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	43,200,000	27,000,000	14,000,000	157,400,000
	Jumlah	124	11	33	33	47	55	330,000,000	237,600,000	237,600,000	338,400,000	297,000,000	184,000,000	1,594,600,000

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat	Hukam Tua	Kepala Urusan	Kepala Sekai	Kepala Jaga	BPD	Hukam Tua	Kepala Urusan	Kepala Sekai	Kepala Jaga	TURJANGAN BPD	ALOKSI DANA DESA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Ratahan													
	1 Rasi	13	1	3	3	6	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	43,200,000	27,000,000	14,000,000	157,400,000
	2 Rasi Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	Jumlah	24	2	6	6	10	10	60,000,000	43,200,000	43,200,000	72,000,000	54,000,000	28,000,000	300,400,000

9	Ratahan Timur													
	1 Wioi	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	2 Wioi Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	3 Wioi Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	4 Wioi Tiga	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	5 Wioi Timur	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	6 Pangu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Pangu Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	8 Pangu Dun	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	9 Wongkai	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	10 Wongkai Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	Jumlah	110	10	30	30	40	50	300,000,000	216,000,000	216,000,000	288,000,000	270,000,000	140,000,000	1,430,000,000

10	Belang													
	1 Watuliny	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	2 Watuliny Tengah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	3 Watuliny Indah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	4 Molompar	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	5 Molompar Utara	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	6 Molompar Timur	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Tababo	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	8 Tababo Selatan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	9 Buku	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	10 Buku Tengah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	11 Buku Utara	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	12 Buku Selatan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	13 Buku Tenggara	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	14 Belang	13	1	3	3	6	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	43,200,000	27,000,000	14,000,000	157,400,000
	15 Ponosakan Belang	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	16 Bongo	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Sekel	Kepala Jaga	BPD	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Sekel	Kepala Jaga	TUNJANGAN BPD	ALOKSI DANA DESA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17 Beringin	9	1	3	3	2	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	14,400,000	27,000,000	14,000,000	128,600,000
	18 Borgo Satu	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	19 Mangkit	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	20 Ponosakan Indah	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	Jumlah	225	20	60	60	85	100	600,000,000	432,000,000	432,000,000	612,000,000	540,000,000	280,000,000	2,896,000,000

11 Pasaman														
	1 Minanga	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	2 Minanga Timur	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	3 Minanga Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	4 Minanga Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	5 Minanga Tiga	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	6 Makahu Selatan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Makahu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	8 Tatengesan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	9 Tatengesan Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	10 Tumbak Madani	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	11 Tumbak	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	12 Bentenan	11	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	13 Bentenan Satu	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	14 Bentenan Indah	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	15 Wiau	10	1	3	3	3	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	27,000,000	14,000,000	135,800,000
	Jumlah	161	15	45	45	56	75	450,000,000	324,000,000	324,000,000	403,200,000	405,000,000	210,000,000	2,116,200,000

12 Ratatotok														
	1 Basaan	13	1	3	3	6	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	43,200,000	27,000,000	14,000,000	157,400,000
	2 Basaan Satu	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	3 Basaan Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	4 Ratatotok	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	5 Ratatotok Satu	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	6 Ratatotok Dua	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	7 Ratatotok Utara	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	8 Ratatotok Selatan	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	9 Ratatotok Tenggara	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
	10 Ratatotok Timur	12	1	3	3	5	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	36,000,000	27,000,000	14,000,000	150,200,000
	11 Ratatotok Tengah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Seksi	Kepala Jaga	BPD	Hukum Tua	Kepala Urusan	Kepala Seksi	Kepala Jaga	TUNJANGAN BPD	ALOKASI DANA DESA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Ratatotok Muara	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
13	Moreah	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
14	Moreah Satu	11	1	3	3	4	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	28,800,000	27,000,000	14,000,000	143,000,000
15	Soyowan	13	1	3	3	6	5	30,000,000	21,600,000	21,600,000	43,200,000	27,000,000	14,000,000	157,400,000
	Jumlah	171	16	45	45	66	75	450,000,000	324,000,000	324,000,000	475,200,000	405,000,000	310,000,000	2,188,200,000
	TOTAL	1,498	135	405	405	553	575	4,050,000,000	2,916,000,000	2,916,000,000	3,981,600,000	3,645,000,000	1,890,000,000	19,398,600,000

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	RET
1	KASUBID		
2	KABID PEMDES		
3	SEKRETARIS BFM. PD		
4	KABAHUKUM		
5	KEPALA BADAN PMPD		
6	KEPALA BADAN PIJUNG		
7	INSPEKTUR		
8	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
9	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
10	WAKIL BUPATI MINAHARA TENGGARA		
11	BUPATI MINAHASA TENGGARA		Di. Me han Usuk Ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP